

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Pada penelitian ini objek yang diteliti adalah Pengaruh *Whistleblowing System* dan Efektifitas Pengendalian Internal. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *Whistleblowing System* dan Efektifitas Pengendalian Internal. Objek yang akan diteliti yaitu perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.

3.2 Metode Penelitian

Berdasarkan Sugiyono (2020:2), "Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah untuk memperoleh data dengan maksud dan kegunaan tertentu." Dalam pelaksanaan penelitian ini, digunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis verifikatif. Pilihan ini diambil karena terdapat variabel-variabel yang akan dianalisis dalam hubungannya, dengan tujuan menyajikan gambaran yang terstruktur dan faktual mengenai hubungan antara variabel yang sedang diteliti.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen (variabel terikat/Y) yaitu pencegahan *fraud* dan variabel independen (variabel bebas/X) yaitu *whistleblowing system*, dan efektivitas pengendalian internal.

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (Sugiyono, 2013:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan *fraud*. Karyono (2013) mendefinisikan pencegahan kecurangan sebagai upaya menangkal dan mempersempit ruang gerak dari pelaku fraud, dan mengidentifikasi setiap kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap kecurangan. Sementara Amrizal (2004), mendefinisikan pencegahan kecurangan sebagai segala upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir penyebab terjadinya kecurangan. Pencegahan *fraud* diukur dengan melihat apakah perusahaan BUMN sudah menetapkan kebijakan anti korupsi. Pengukuran ini dilandasi dari *fraud triangle*

theory, yang artinya sebuah skema kerja yang dirancang untuk menjelaskan alasan dibalik suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh karyawan ditempat kerja. Menurut Kurniawan (2015) dalam Humam, Ardini, & Kurnia (2020) menjelaskan bahwa terdapat dorongan yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).

Untuk mengukur apakah perusahaan tersebut sudah menetapkan kebijakan anti korupsi, maka dapat diukur dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi terdapat 6 item. Skor didapatkan dari berapa jumlah item yang diungkapkan pada *annual report* dan di *website* resmi perusahaan. Kriteria informasi pencegahan *fraud* yang perlu diungkapkan, yaitu:

Table 3.1 Kriteria Pencegahan *Fraud*

No	Uraian Kriteria
1	Terdapat kebijakan anti korupsi
2	Terdapat tata Kelola perusahaan dan budaya birokrasi anti korupsi
3	Terdapat kapabilitas karyawan anti korupsi yang profesional dan berintegritas
4	Pelibatan Masyarakat/ karyawan dalam pencegahan korupsi di Tingkat unit maupun Lembaga
5	Terdapat sistem penanganan perkara yang berbasis teknologi informasi
6	Teroptimisasinya tata kelola penerimaan perusahaan secara transparan dan akuntabel

Sumber: PP RI No. 54 Th 2018

Untuk menghitung variabel Pencegahan *Fraud* dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PF = \frac{\text{jumlah item yang dilaksanakan}}{\text{jumlah item seharusnya}} \times 100\%$$

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2013:39).

1. Pengaruh *Whistleblowing System* (X_1)

Pengaruh *Whistleblowing System* (X_1) adalah sarana pelaporan untuk mengadukan karyawan atau pimpinan organisasi yang melakukan pelanggaran hukum, melakukan perilaku tidak etis, atau melakukan aktivitas lain yang berpotensi merugikan perusahaan atau pemangku kepentingan kepada pihak yang berwenang menangani *fraud* (Atmadja dkk. 2019). Menurut Anandya & Werastuti (2020), secara tidak langsung adanya *whistleblowing system* menjadi sebuah bentuk pengawasan pada organisasi. Menurut KNKG (2008), manfaat penerapan WBS yang baik salah satunya adalah munculnya ketidakmauan untuk bertindak *fraud*, karena percaya dengan sistem pelaporan yang efektif. Menurut Suharto (2020), meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran, kebijakan sekurangnya meliputi: Perlindungan bagi pelapor, peraturan terkait pelaporan *fraud*, sistem pengaduan dan mekanisme tindak lanjut untuk laporan *fraudulent*, dan kebijakan harus transparan dan konsisten dilaksanakan.

Menurut penelitian Hafsa (2021), Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel *whistleblowing system* dalam penelitian ini adalah item yang dilaksanakan (*whistleblowing system*) pada Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP menurut KNKG (KNKG, 2008) dan juga pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN SK-16 Tahun 2012. Item pelaksanaan *whistleblowing system* menurut tersebut terdiri dari 25 item. Skor didapatkan dari berapa jumlah item yang diungkapkan pada *annual report* dan pada *website* resmi perusahaan. Kriteria informasi *Whistleblowing System* yang perlu diungkapkan, yaitu:

Table 3.2 Kriteria *Whistleblowing System*

No	Uraian Kriteria
1	Terdapat Kebijakan mengenai Pelaporan atas dugaan penyimpangan (<i>Whistleblowing System</i>)
2	Terdapat Perlindungan untuk Pelapor (<i>Whistleblower</i>)
3	Terdapat unit pengelola system pelaporan pelanggaran
4	Terdapat materi Kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran pada Pedoman
5	Terdapat mekanisme penyampaian pelanggaran (infrastruktur dan mekanisme, kerahasiaan dan perlindungan pelapor, komunikasi dengan pelapor)
6	Terdapat Materi Pelaksanaan investigasi pada Pedoman
7	Terdapat materi Pelaporan atas penyelenggaraan sistem pelaporan pelanggaran pada Pedoman
8	Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan <i>Whistleblowing System</i> kepada karyawan Perusahaan.
9	Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan <i>Whistleblowing System</i> kepada <i>stakeholders</i> Perusahaan.
10	Terdapat sarana/media perusahaan yang memadai untuk mendukung kebijakan <i>Whistleblowing System</i>
11	Pernyataan komitmen terhadap pembentukan budaya kepatuhan dan perilaku etis secara umum (Compliance and Ethics programme)
12	Pernyataan komitmen terhadap program penerapan Sistem Penerapan Pelaporan (<i>Whistleblowing System</i>)
13	Dokumen resmi yang menjelaskan manfaat dan pentingnya SPP/WBS bagi perusahaan dan alasan penerapannya di perusahaan
14	Dokumen resmi yang memberikan penjelasan tata cara (prosedur) pelaporan pelanggaran
15	Dokumen resmi yang menyatakan perilaku apa saja yang dapat dilaporkan sebagai pelanggaran dengan menggunakan jalur SPP/WBS
16	Penjelasan resmi siapa sajakah yang dapat memanfaatkan jalur SPP/WBS dalam melaporkan pelanggaran yang diketahuinya (karyawan, supplier, masyarakat umum)
17	Dokumen penegasan bahwa penyampaian laporan yang bersifat fitnah atau palsu tidak akan diproses dan bahkan akan diberi sanksi bila terbukti demikian
18	Pernyataan perusahaan bahwa pelapor dan laporannya akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya
19	Pernyataan komitmen perusahaan untuk melindungi pelapor (<i>Whistleblower Protection Policy</i>) dari segala bentuk tindakan-tindakan pembalasan yang

	mungkin terjadi dari terlapor, atasan-atasannya atau pihak lain yang terkena dampak pelaporannya
20	Pernyataan bahwa pelapor akan menerima kabar mengenai proses penanganan laporan pelanggaran yang disampaikan
21	Dokumen yang berisikan penjelasan mengenai hak-hak pelapor terkait dengan proses yang terjadi akibat pelaporan pelanggaran yang disampaiakannya, misalnya permohonan untuk direlokasi dalam upaya menjaga anonimitas dari pelapor, atau cuti selama proses investigasi dilakukan
22	Uraian umum mengenai proses investigasi yang akan dilakukan perusahaan setelah menerima laporan pelanggaran yang valid, termasuk komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip kewajaran dan keadilan dalam proses investigasi tersebut
23	Penjelasan apakah pelaporan pelanggaran dapat dilakukan secara anonim atau tidak
24	Komitmen bahwa melakukan penunjukan petugas Perlindungan Pelapor yang kompeten dan jujur, serta terbuka bagi semua karyawan
25	Pernyataan komitmen perusahaan untuk senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan efektifitas program SPP/WBS

Sumber: KNKG Th 2008 & SK BUMN No 16 Th 2012

Untuk menghitung variabel pengaruh *whistleblowing system* dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pengaruh WBS} = \frac{\text{jumlah item yang dilaksanakan}}{\text{jumlah item seharusnya}} \times 100\%$$

2. Efektivitas Pengendalian Internal (X₂)

Efektivitas sistem pengendalian internal (X₂) diartikan sebagai kemampuan sistem pengendalian internal yang direncanakan dan diterapkan agar mampu mewujudkan tujuannya yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku secara efektif dan efisien. (Tandri, 2015). Efektivitas pengendalian internal dapat diukur dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Terdapat 14 item yang dapat ditentukan dengan melakukan pengamatan mengenai keberadaan suatu kriteria informasi yang ditentukan dalam laporan tahunan Perusahaan dan *website* resmi

perusahaan. Apabila kriteria informasi yang ditentukan tersebut ada dalam laporan tahunan Perusahaan dan *website* resmi perusahaan, maka akan di beri skor 1 (satu). Apabila kriteria informasi yang ditentukan tersebut tidak ada dalam laporan tahunan atau dalam *website* Perusahaan, maka akan diberi skor (nol). Setiap kriteria tersebut akan dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor perusahaan.

Kriteria informasi pengendalian internal yang perlu diungkapkan dalam laporan tahunan, yaitu:

Table 3.3 Kriteria Efektivitas Pengendalian Internal

No	Uraian Kriteria
1	Organisasi telah memiliki Kebijakan mengenai Pengendalian Internal
2	Terdapat Struktur dan kedudukan unit audit internal
3	Terdapat Tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (<i>charter</i>) unit audit internal perusahaan
4	Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku
5	Terdapat <i>Review</i> atas efektivitas system manajemen risiko perusahaan
6	Terdapat Gambaran umum mengenai system manajemen risiko Perusahaan
7	Terdapat klasifikasi Jenis risiko dan cara pengelolaannya
8	Terdapat Kebijakan atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi
9	Terdapat SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons
10	Terdapat Integritas organisasi yang terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas telah tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi/unit kerja
11	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten
12	Terdapat alokasi sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.
13	Dalam Struktur organisasi terdapat unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal.
14	Terdapat hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.

Sumber: PP No. 60 Th 2008

Kriteria sebanyak 14 poin tersebut diasumsikan dapat mewakili keseluruhan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder*, yang dapat menggambarkan pelaksanaan

pengungkapan informasi pengendalian internal yang dilakukan oleh Perusahaan. Selanjutnya, kriteria-kriteria tersebut akan menentukan skor Perusahaan yang akan diukur dengan rumus berikut, yang telah diolah dari Paramitha (2012).

$$EPI = \frac{\text{jumlah item yang dilaksanakan}}{\text{jumlah item yang harus diungkapkan}}$$

3.2.3 Operasional Variabel

Table 3.4 Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Data
<i>Fraud</i> (Y)	Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2011) menyatakan definisi kecurangan (fraud) sebagai setiap salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan.	PF $= \frac{\text{jumlah item yang dilaksanakan}}{\text{jumlah item diungkapkan}}$	Rasio
<i>Whistleblowing System</i> (X ₁)	<i>Whistleblowing system</i> adalah suatu sistem pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan (Semendawai dkk. 2011:70).	WBS $= \frac{\text{jumlah item yang dilaksanakan}}{\text{jumlah item diungkapkan}}$	Rasio
Efektivitas Pengendalian Interbal (X ₂)	Efektivitas sistem pengendalian internal diartikan sebagai kemampuan sistem pengendalian internal yang direncanakan dan diterapkan agar mampu mewujudkan tujuannya yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang	CDI $= \frac{\text{jumlah item yang dilaksanakan}}{\text{jumlah item diungkapkan}}$	Rasio

	berlaku secara efektif dan efisien. (Tandri, 2015)		
--	--	--	--

Sumber: Data Olahan Peneliti

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Dimana data tersebut bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023 dan diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

3.5 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2013:80) merupakan suatu objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023 sebanyak 42 perusahaan. Penggunaan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi karena perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada pihak-pihak luar Perusahaan, sehingga memungkinkan data laporan tahunan tersebut diperoleh dalam penelitian ini.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2013:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023 yang berjumlah 42 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang berdasarkan oleh kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu (Agung & Zarah, 2016:69). Dari 42 perusahaan yang dijadikan populasi kemudian disesuaikan dengan kriteria menggunakan teknik purposive sampling. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 perusahaan. Kriteria sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Perusahaan BUMN di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2020-2023 dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut selama periode 2020-2023.

Table 3.5 Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria Sample	Jumlah
1.	Populasi : Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.	42
Pengurang atas Kriteria Sampel		
1.	Perusahaan BUMN yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara berturut – turut selama periode 2020-2023	(17)
Jumlah Sampel yang memenuhi kriteria		25
Tahun Pengamatan		3
Jumlah Observasi		100

Sumber: Data Olahan Peneliti

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka terdapat 25 perusahaan BUMN sebagai sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan pada periode 2020-2022 sehingga menghasilkan data penelitian sebanyak 100. Berikut merupakan nama perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2020-2023 yang menjadi sampel penelitian :

Table 3.6 Daftar Sampel Penelitian

No.	Kode	Nama Perusahaan
1.	PPLN	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
2	PIHC	PT Pupuk Indonesia (Persero)
3	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
4	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
6	BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
7	TLKM	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
8	ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
9	JSMR	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
10	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

11	WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
12	GIAA	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
13	ISAT	PT Indosat Tbk
14	PIGN	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
15	SMBR	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
16	TINS	PT Timah TBK
17	PGEO	PT Pertamina (Persero)
18	KRAS	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
19	DNRK	PT Danareksa (Persero)
20	PTHK	PT Hutama Karya (Persero)
21	WSKT	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
22	KAIL	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
23	BBKP	PT Bank KB Bukopin Tbk
24	POST	PT Pos Indonesia (Persero)
25	PPAP	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Sumber: Data Olahan Peneliti

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode *non participant observation*, yang artinya metode yang dilakukan peneliti dengan hanya mengamati data yang telah tersedia tanpa ikut menjadi bagian didalamnya, serta mencatat data yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id.

Setiap tahun, data dari laporan keuangan dianalisis dengan menilai seluruh kriteria dari ketiga variabel utama: Pengaruh *whistleblowing system*, *efektivitas pengendalian internal*, dan pencegahan *fraud*. Proses analisis dilakukan secara bertahap untuk setiap tahun periode analisis.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perubahan tahunan dalam praktik tata kelola dan pengendalian internal di BUMN serta mengukur

kemajuan atau kemunduran dalam pencegahan fraud, penerapan sistem whistleblowing, dan efektivitas pengendalian internal. Data sekunder yang dianalisis ini memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana BUMN beradaptasi dengan kebijakan dan regulasi yang ada serta menghadapi tantangan dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

3.7 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.6.1 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan statistik deskriptif melalui analisis linear berganda. Pengolahan dan perhitungan data pada penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS Statistics 26 dan microsoft excel.

3.6.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul dengan tujuan memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum serta minimum dari masing-masing variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apabila model yang dihasilkan dapat dilanjutkan analisisnya atau tidak. Agar model dapat dianalisis serta dapat memberikan hasil yang representative maka model tersebut harus memenuhi asumsi dasar klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas data dilihat dari nilai probabilitas (signifikan). Dimana nilai probabilitas (signifikan) $> 0,05$ berarti data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai dari probabilitas (signifikan) $< 0,05$ berarti data berdistribusi tidak normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas terjadi jika ada hubungan linier yang sempurna atau hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi atau disebut dengan koefisien korelasinya tinggi atau bahkan bernilai 1. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan adanya korelasi antara variabel independen, karena seharusnya dalam model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (independen) (Ghozali, 2013:105).

Salah satu pengujian multikolinearitas dapat menggunakan korelasi bivariat yang memiliki ketentuan yang harus dipenuhi yakni, jika antar variabel independen terdapat korelasi yang tinggi atau diatas 0,9 maka dapat diindikasikan adanya multikolinearitas, sedangkan apabila antar variabel terdapat korelasi yang rendah atau dibawah 0,9 maka tidak ada terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013).

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu tidak samanya varians bagi variabel independen yang diuji dalam pengaturan yang berbeda. Pengujian ini dilakukan untuk menguji dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

Jika varian dari residual pengamatan yang lain tetap dapat disebut heteroskedastisitas, karena apabila suatu model penelitian yang baik tidak terdapat heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas

dilakukan pengujian dengan menggunakan uji white. Dengan ketentuan jika probabilitas $Obs*R\ Squared > 0,05$, maka model tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika probabilitas $Obs*R-Squared < 0,05$, maka model tersebut terdapat heteroskedastisitas.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah nilai korelasi antara nilai residual time series pada waktu yang berbeda, dan terjadi apabila ada korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Dalam penelitian ini, keberadaan autokorelasi diuji menggunakan uji *Lagrange Multiplier (LM Test)*/uji Breusch-Godfrey dengan membandingkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 5\%$ (0,05). Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka terjadi autokorelasi.

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2018), analisis regresi linier berganda merupakan suatu metode pemodelan regresi yang mengevaluasi dampak dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat, dengan tujuan membuktikan adanya kausalitas antara dua variabel atau lebih dengan satu variabel terikatnya. Dalam proses analisis regresi linier berganda, kita dapat mengidentifikasi arah dan sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ghozali (2018) menyatakan bahwa hasil dari analisis regresi ini dinyatakan dalam bentuk koefisien untuk setiap variabel bebas, yang diperoleh melalui prediksi nilai variabel terikat menggunakan suatu rumus.

Pada penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan apakah terdapat atau tidak adanya pengaruh *whistleblowing system* dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Rumus regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Pencegahan *Fraud*

α : Konstanta

X_1 : Pengaruh *Whistleblowing System*

X_2 : Efektivitas Pengendalian Internal

β : Koefisien *Whistleblowing System*

β : Koefisien Efektivitas Pengendalian Internal

e : Error

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang telah diungkapkan. Pengujian ini dilakukan dengan memperoleh tahap berikut ini :

3.6.4.1 Uji Statistik t

Menurut Ghozali (2018) mengartikan uji statistik t sebagai metode untuk menguji peran parsial antar variabel bebas dalam penelitian terhadap variabel terikat, khususnya pada pengujian koefisien regresi. Kemudian, menurut Dr. Riduwan & Dr. Sunarto (2010), uji statistik t dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antar variabel yang diajukan dalam hipotesis. Hipotesis ini dirumuskan sebagai jawaban sementara yang akan diuji dan dibuktikan melalui uji statistik t secara parsial.:

1. Hipotesis 1

H_0 : *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.

H_{a1} : *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.

2. Hipotesis 2

H_0 : Efektivitas Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.

H_{a2} : Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.

Dengan menggunakan titik kritis t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5% yang membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, maka didapatkan kaidah keputusan yang ditetapkan sebagai berikut:

- Jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak, sehingga H_a diterima yang artinya Variabel X mempengaruhi Variabel Y.
- Jika $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima, sehingga H_a ditolak yang artinya Variabel X tidak mempengaruhi Variabel Y.